

## POTRET ATAS PEMAHAMAN *GOOD GOVERNANCE*

**Diah Ayu Septi Fauji**

Staf Pengajar Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Nusantara PGRI

Email: [Dseptifauzi@gmail.com](mailto:Dseptifauzi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persepsi masyarakat Desa Sukopuro atas *Good Governance*. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah agar pihak-pihak terkait bisa benar-benar menerapkan *Good Governance*. *Good Governance* merupakan dambaan bagi pemerintahan Republik Indonesia, namun dalam hal ini Indonesia sendiri menjadi negara yang sedang berjuang untuk menciptakan *Good Governance*. Untuk mendapatkan Potret atas pemahaman *Good Governance* oleh masyarakat Desa Sukopuro dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Masyarakat kurang memahami atas *Good Governance* (2) Masyarakat desa hanya mengetahui kepala desanya baik, jalan sudah bagus, tidak kekurangan air dan biaya ke puskesmas murah. Hal ini menunjukkan bahwa substansi *Good Governance* dipahami dengan basis kearifan lokal, masyarakat tidak tahu apa sebenarnya substansi dari *Good Governance*.

Kata Kunci : *Good Governance*, Pemerintah Desa.

### Abstract

*This study aims to map the public perception of Sukopuro Village on Good Governance. The specific objective of this research is that stakeholders can actually implement Good Governance. Good Governance is a dream for the government of the Republic of Indonesia, but in this case Indonesia itself is a country that is struggling to create Good Governance. To get a Portrait of Good Governance understanding by Sukopuro Village community in this research is obtained by using qualitative method with phenomenology approach. The results of this study indicate that (1) The community lacks understanding of Good Governance (2) The villagers only know the good village, the road is good, not the lack of water and the cost to the low-cost health center. This shows that the Good Governance substance is understood on the basis of local wisdom, people do not know what is actually the substance of Good Governance.*

*Keywords: Good Governance, Village Government*

## PENDAHULUAN

Pada era pemerintahan sekarang ini, begitu banyak dana digelontorkan ke desa – desa diseluruh Indonesia. Tujuannya adalah

agar Pembangunan merata di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut tentulah diperlukan peran serta dari pemerintah desa. Pemerintahan desa yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa.

Sebagai upaya mencegah terjadinya KKN dan gangguan lain dalam mewujudkan pembangunan desa, maka penting sekali bagi pemerintah desa untuk menerapkan *Good Governance*. Seperti diketahui bersama bahwa permasalahan bangsa Indonesia dewasa ini semakin kompleks. Oknum – oknum pemerintah yang seharusnya menjadi panutan rakyat justru menjadi tontonan rakyat karena tersandung masalah hukum. Selain pemerintah desa, diperlukan juga partisipasi aktif dari warga masyarakat umumnya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Dalam pasal ini salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

*Good Governance* mengandung dua pengertian yaitu menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta sebagai aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto(2008) beberapa prinsip yang harus diterapkan demi terwujudnya *Good Governance* yaitu:

1. Akuntabilitas yang merupakan suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.
2. Efisiensi. Dalam hal ini efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input dan output. Jika suatu output dapat dicapai dengan input yang minimal maka dinilai efisien.
3. Responsivitas atau yang lebih sering diartikan sebagai daya tanggap merupakan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas untuk mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan.
4. Partisipasi . Dalam hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat sejak awal harus dilibatkan dalam meruuskan berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, misalnya jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, cara terbaik untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mekanisme untuk mengawasi proses pelayanan dan mekanisme untuk mengevaluasi pelayanan.
5. Transparansi. Konsep ini menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan

*stakeholders* yang membutuhkan. Karena itu setidaknya ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator kedua dari transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder* yang lain. Yang ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun paradigma *Good Governance* sampai dengan saat ini belum semua teradopsi oleh pemerintahan desa dan juga masyarakatnya. Oleh karenanya, dirasa penting bagi penulis untuk melihat potret masyarakat atas penerapan *Good Governance*. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman makna *Good Governance* masyarakat desa. Sehingga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintahan desa untuk memberikan wawasan terkait *Good Governance*, meningkatkan penerapan *Good Governance* serta penerapan kebijakan dengan melibatkan masyarakat desa.

## **METODE**

Metode merupakan konsekuensi logis dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Yang mana untuk mendapatkan potret realitas yang ada terkait dengan pemahaman masyarakat atas *Good Governance* yang paling sesuai adalah

metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut salah satu tokoh fenomenologi, Edmund Husserl (Kuswano, 2009) “ Dengan Fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk – bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah – olah kita mengalami sendiri. Penelitian ini dilakukan oleh penulis selama 4 bulan mulai dari bulan November 2016 sampai Februari 2017. Penulis dalam hal ini berbaur dengan masyarakat dan melakukan wawancara langsung kepada informan sebagai teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh informan yang mencukupi penulis menentukan 5 (lima) kriteria yaitu 1) *Relevance*, 2) *Recommendation*, 3) *Rapport*, 4) *Readiness*, 5) *Reassurance* pemilihan informan ini penting karena dalam penelitian kualitatif jawaban dari ini sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Kemudian dalam tahap validasi data, penulis melakukan triangulasi baik itu triangulasi metode ataupun triangulasi sumber. Selanjutnya penulis melakukan analisis terkait data yang didapat dengan cara: 1) *Noema*, 2) *Epoche*, 3) *Noesis*, 4) *Intentional Analysis*, dan 5) *Eidetic Reduction*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi fenomenologi pada masyarakat di desa Sukopuro dalam memahami dan memaknai dari luar atau dari arus utama pengalaman melalui proses tipikasi. Tipikasi masyarakat di Desa Sukopuro adalah sebagai berikut : (1) masyarakat A dengan latar belakang

pendidikan STM/SMA,(2) masyarakat B dengan latar belakang pendidikan SMP/SD/ Putus Sekolah. Tipikasi tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1:HasilTipikasi

| Informan          | Masyarakat A | Masyarakat B |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1. Informan Bpk S | √            |              |
| 2. Informan Bpk Y | √            |              |
| 3. Informan Ibu S |              | √            |
| 4. Informan Ibu Q | √            |              |
| 5. Informan Ibu N |              | √            |
| 6. Informan Bpk R |              | √            |

**Potret Kesadaran Masyarakat atas penerapanGood Governance**

“Lurah ingkang anyar niku ingkang ndandani paving – paving teng gang – gang alit ngeten niki, riyen dereng wonten. Riyen niku pados toyo (air) angel trus deso kaleh warga sami ndamel pet (pipanisasi) mendet toyo dugi sumber celak coban Jahe (Noema). Dados deso ingkang maringi dana, tiyang – tiyang ingkang mboten nyambut damel nderek mbangun proyek niku(Noesis). Sakniki pun sekeco wes.toyo murah paling boros niku mbayar Rp.5.000 mbayare dhateng Pak RT. Tapi duko artone ingkang didamel mbangun dalam niku dugi pundi (Epoche). Pokok-e wonten proyek masyarakat saget nyambut damel trus dalam-e sae, toyo lancar. Kulo niku nembe leren saking pendamelan sakderenge kulo dados satpam teng suroboyo, dados teng deso mriki nggih nyambut damel sak wontene. Lek dugi

*deso maringi pelatihan ngoten nggih seneng –seneng mawon” (Informan Bpk. S termasuk masyarakat A)*

Data diatas memberikan gambaran bahwa substansi dari *Good Governance* ternyata belum dapat dipahami oleh masyarakat, dari pihak desa sendiri pun nampak kurang transparan terkait pengelolaan proyek yang dilakukan. Apa yang disampaikan oleh bpk. S menyatakan secara tidak langsung pemerintah desa sudah menerapkan sebagian dari ciri penerapan *Good Governance*, meskipun istilah yang dipakai bukan *Good Governance*. Senada dengan bpk. S, informan kedua bpk Y (masyarakat A) yang juga menyebutkan bahwa tidak tahu uang untuk pelaksanaan proyek jalan itu dari mana. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

“ *Kulo niku sanes anggota BPD, LPMD dados nggih mboten semerep artone proyek saking pundi. Soale masyarakat kados kulo ngeten niki mboten diajak musyawarah(Noema). Lek pas pipanisasi niko, warga niku nggih iuran trus warga ingkang mboten mampu nggih nyumbang tenogo ingkang masang pipo dugi sumber sampe deso mriki(Noesis). Sakniki pun mboten wonten masalah kekurangan toyo.estri kulo niku nggih mboten remen nderek kegiatan teng balai deso,duko kencing nopo. (lalu istrinya datang dari belakang sambil membawa teh untuk penulis), kulo niku isin lek nderek PKK, pun ndrek pengaosan mawon. Kemudian bpk Y ganti bertanya kepada penulis “ ngeten niki hasil riset-e mangke damel nopo nggih?Penulis menjawab “lek kulo sampun semerep masalah inti dugi*

masyarakat mangke badhe wonten diskusi bareng perangkat desa kalian warga, dados-e saget nemu solusine bareng. Bpk Y melanjutkan pembicaraanya“ lek ngoten nggih sae, soale kersane perangkat niku nggih semerep keluhan asli wargane.

Berbeda dengan informan sebelumnya, kemudian penulis menemui informan berikutnya yaitu Ibu S (Masyarakat B):

“Lurah sakniki niku sae, putu kulo sakit ditambahne sampe dugi lawang. Kulo paringi arto mboten purun(sambil tersenyum)(Noema). Sak niki tiyang – tiyang ingkang mboten gadah ngoten nggih diparingi bantuan, ingkang omahe elek dibangun e. Lek sakit teng puskesmas namuk bayar Rp.2000. tapi kulo mboten gadah bpjs kesehatan(Epoché).

Selanjutnya penulis menemui ibu Q(Masyarakat B):

“Bapak-e (baca:suami) sakniki dados ketua RT 2, lha soale mboten wonten ingkang purun dados RT. Tapi bapak e nyambut damel teng saben kaleh tegil(ladang)(Noema). Lek kulo nyambut teng perumahan sulfat. Masio kulo dados bu RT tapi kulo mboten nderek PKK, riyen nderek tapi akhir – akhir niki mboten nderek soale isin. Sing nderek PKK tiyang ageng-ageng(baca:kaya). Jane program- e p.lurah niku nggih sae, tapi sayang-e teng deso niki mboten wonten TPA-ne. Lek mbuwak sampah teng kebon-e piyambak dibakar, lek mboten ngoten

nggih teng kali kalian pinggir sawah(epoché).

Berlanjut ke informan N (Masyarakat B) pada saat penulis melakukan wawancara beliau sedang sakit:

“Kulo niki ngopeni tiyang sepah sakit malah melu – melu sakit. Tiyang sepah kulo niku sakit –sakitan lha trus bek (bibi) kulo nggih sakit mboten saget ningali kaleh sukune namuk setunggil. Mpun berobat tapi lek berobat ndamel bpjs niku kulo malah nelongso mergi diangel – angel(Noema), sambil berjalan menunjukkan kondisi bibinya yang sakit, beliau menyambung kalimatnya lagi. Ngeten niki sing mbantu kulo kaleh bek niki malah tonggo – tonggo. Griyo kulo niku nggih gedhek jebol terose wonten bantuan dugi deso badhe dibangun-ne, tibak-e sampek sakniki nggih mboten wonten kabare. Kulo pun disuwuni fotokopi KK jane, tapi nggih duko(Noesis)”.

Kemudian penulis mewawancarai Bapak R(Masyarakat A):

“kulo niku sanes tiyang mriki asli. Sing asli mriki estri kulo. Tapi kulo pun dangu(baca: lama) teng mriki . Kulo nyambut damel e ternak ayam potong. Niku nggih mboten teng deso mriki tapi teng cleret kaleh pakis. Kulo mboten nate ngikuti program e deso. Estri kulo nggih teng griyo mawon mboten nderek PKK. Duko program e deso nopo mawon(Noema).Wes sing penting saget urip, lancar nyambut damel ngoten mawon. Wong kulo nggih mboten angsal bpjs(dengan nada acuh tak acuh)”.

Hal diatas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait dengan *Good Governance* itu minim, meskipun sebenarnya beberapa hal baik yang disampaikan oleh responden adalah bagian dari *Good Governance*.

### **Masyarakat hanya tahu jalan yang ada sudah bagus dan air tercukupi**

Dari hasil wawancara diatas beberapa kali disebutkan bahwa program desa terkait jalan dan air sudah bagus meskipun tidak tahu dananya dari mana. Dari hasil pengamatan yang penulis dapatkan, masyarakat desa ini merupakan masyarakat yang guyub, dan merasa fasilitas yang telah diberikan pemerintah desa itu sudah cukup. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman akan penerapan *Good Governance* itu sangat minim.

Penerapan *Good Governance* pada pemerintahan desa dijelaskan oleh Anas Heriyanto, kemudian Ayu Amrina (2016) yang baik meliputi partisipasi, akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, efektivitas dan efisiensi serta responsivitas. Dalam hal ini masyarakat belum mengetahui substansi *Good Governance*. Mereka masih memahami apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan basis kearifan lokal.

### **SIMPULAN**

*Good Governance* merupakan cita – cita bangsa. Sampai dengan saat ini belum semua teradopsi oleh pemerintah desa. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi *Good Governance* sebagai modal menuju manajemen pemerintahan yang baik yang bersumber dari kesadaran dan pengalaman

subjek dalam perspektif emik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa dengan tipikasi Masyarakat A dan B ini keduanya belum memahami substansi tentang *Good Governance*. Masyarakat hanya tahu bahwa jalan – jalan di desa sudah dibangun dan mereka tidak pernah kekurangan air serta biaya berobat ke puskesmas murah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Handoyo, R Joko (2014). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2(4)2014: 3363-3373. ISSN 0000-0000. [ejournal.ip.fisip.unmul.org](http://ejournal.ip.fisip.unmul.org)
- Maryam, N.S. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol VI No. 1/ Juni 2016.
- Rosyada, A.A. (2016). *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda*. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(1)2016: 102-114. ISSN 2477-2631 [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id).
- Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. LAKSBANG.

Undang – Undang Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.2014. Jakarta: Bumi Aksara.